

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI DESA GUNUNGSARI

Kezia Novi Hastutiningtyas
162019002@student.uksw.edu
Universitas Kristen Satya Wacana^{1) 2)}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa, dimana terdapat variabel kompetensi SDM, kualitas data, dukungan manajemen puncak, kualitas sistem dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel pemoderasi.. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel kualitas data, dukungan manajemen puncak dan kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Kata Kunci: *Implementasi siskeudes, Kualitas laporan keuangan*

Info Artikel

Diterima: 28 April 2022

Disetujui: 25 Mei 2023

Dipublikasikan: 30 Juni 2023

PENDAHULUAN

Sistem tata kelola yang tepat terhadap suatu institusi maupun lembaga atau lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) mutlak diperlukan apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Dengan adanya sistem tata kelola yang baik, mengindikasikan kinerja baik dari manajemen sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan lembaga. Sektor pemerintahan tidak terkecuali, dalam hal ini setiap instansi milik pemerintah dituntut untuk dapat memberikan informasi serta laporan pertanggung jawaban (akuntabilitas) yang jelas dan transparan atas hasil kinerja yang dilakukan terhadap para *stakeholder* yaitu masyarakat. Berbagai Peraturan Pemerintah dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaannya. Pemerintah daerah dalam hal ini seperti yang dijelaskan pada Pradono and Basukianto (2015) menyatakan bahwa peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat harus dijadikan sebagai acuan, sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan tertib, ekonomis dan efisien, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektif dan transparan.

Desa menjadi suatu bagian berasal pemerintahan, tidak luput berasal tuntutan transparansi serta akuntabilitas terkait pengelolaan keuangannya (Septiawan, 2018). Dimana sudah banyak peraturan pemerintah buat pengaturan desa. UU nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa adalah suatu tonggak baru pada sistem swatantra desa, pada UU ini desa diberi otorisasi yang luas dalam mengelola tata pemerintah sendiri dan termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa buat peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa diberi keleluasaan buat mengelola keuangan serta kekayaan milik desa.

Penerimaan dana oleh pemerintah desa tentunya akan berdampak di tuntutan tanggungjawab pengelolaan tadi asal pengelola. Pemerintah desa diwajibkan buat menyusun laporan realisasi aplikasi aturan Penerimaan dan Belanja (APB) Desa serta Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi aplikasi APB Desa. Laporan akibat pengelolaan keuangan desa adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap rakyat sesuai menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai panduan Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah pusat melalui BPKP memberikan aplikasi pengelolaan keuangan desa berupa sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk membantu dan memudahkan para perangkat desa dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan desa secara cepat dan efisien (Rahmawati & Fajar, 2017). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Rusmayanti (2014) yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa menjadi lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa serta pendokumentasian menjadi lebih mudah karena jumlah berkas yang efisien serta manfaat information yang bisa digunakan untuk jangka panjang.

Kualitas pengelolaan dan laporan keuangan yang didapatkan bisa diukur menggunakan membandingkannya dengan pendapat asal BPK atas yang akan terjadi audit yg dilakukan. pada kurun saat 2 tahun terakhir audit BPK terhadap kementerian desa menyatakan pendapat lumrah tanpa dispensasi, tetapi baru-baru ini ada pernyataan berasal lembaga independen komisi pemberantasan korupsi (komisi pemberantasan korupsi) yang menyatakan bahwa yang akan terjadi audit BPK atas kementerian desa disangsikan kebenarannya sebab adanya dugaan suap terhadap oknum BPK.

Desa gunungsari salah satu desa dimana penerapan sistem keuangannya belum optimal. Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa gunungsari masih menggunakan manual jadi belum terkomputerisasi secara online.

Menurut kepala DPMD penanggulangan dana desa disebabkan tidak lengkapnya persyaratan administrasi yang merupakan laporan perencanaan dari pengelolaan keuangan pemerintah desa dalam tahun berjalan

Penelitian yang berkaitan dengan konflik diatas sudah dilakukan sebelumnya oleh Kamal and Noermansyah, (2010) yang meneliti SKPD pemkot Yogyakarta, dimana hasilnya memberikan

bahwa dukungan manajemen puncak, kualitas data serta taraf pemahaman pengguna secara bersama-sama mensugesti implementasi sistem keuangan desa. yang akan terjadi yg sama di pengujian terhadap faktor-faktor tadi ditambah menggunakan variabel implementasi SIMDA, hasilnya mengambarkan korelasi positif signifikan saat dihubungkan di pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. akibat tadi sejalan menggunakan penelitian yang dilakukan oleh dan Al-Hiyari et al., (2013).

Pemerintah sudah menetapkan Siskeudes untuk dapat diaplikasikan pada seluruh desa di wilayah Indonesia dengan harapan terdapat keseragaman atas pengelolaan serta laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan adanya keseragaman akan lebih mudah untuk menilai kualitas kinerja dari setiap desa, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan maupun masyarakat pada umumnya.. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan maupun implementasi Siskeudes yang kemudian berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pada setiap desa.

Kualitas Laporan Keuangan Peraturan Pemerintah (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mensyaratkan kualitas laporan keuangan harus dipenuhi oleh setiap sektor pemerintahan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari para pemakainya. Terdapat dua kriteria utama sesuai dengan peraturan pemerintah di atas yang dibutuhkan agar manajemen dapat memberikan bentuk pertanggungjawaban kegiatannya dengan laporan keuangan yang memberikan kepuasan bagi pengguna informasi. Relevansi yaitu setiap informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan desa dalam hal ini harus memenuhi unsur memberikan manfaat umpan balik (feed back), memiliki manfaat prediktif berkaitan keputusan dan konsekuensi apa saja yang bisa terjadi pada entitas pemerintah serta tepat waktu.

Sistem Keuangan Desa Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan s u a t u aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa (BPKP, 2016). Fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan consumer friendly sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Pemrosesan penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, akan menghasilkan beberapa output berupa dokumen penatausahaan dan laporan- laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa, dimana terdapat variabel kompetensi SDM, kualitas data, dukungan manajemen puncak, kualitas sistem dan pemanfaatan teknologi informasi.. dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah desa, dimana terdapat variabel kompetensi SDM, kualitas data, dukungan manajemen puncak, kualitas sistem dan pemanfaatan teknologi informasi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai sistem keuangan desa gunungsari, penelitian ini menggunakan data subjek (self report data) yang berasal dari hasil wawancara serta isian hasil

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap sistem keuangan desa (siskeudes) dan kualitas laporan keuangan dilakukan pada objek pemerintah desa di wilayah desa gunungsari. Variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi SDM, kualitas sistem, kualitas information, dan implementasi sistem keuangan desa, yang digunakan untuk menguji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Sedangkan, variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah kualitas sistem dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dan responden dalam penelitian ini adalah kaur keuangan dan bendahara desa yang mengelola sistem keuangan desa.

Sumber daya manusia memperkuat pengaruh implementasi siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan. yang ada sehingga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Banyaknya tuntutan dari pihak eksternal membuat aparat pemerintah desa untuk memahami sistem keuangan desa karena sistem ini dapat membuat kaur keuangan dan bendahara akan lebih fleksibel, efisien dan efektif dalam bekerja sehingga memudahkan dalam proses pelaporan keuangan desa dan pertanggung jawaban desa.

pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik management dalam memanfaatkan teknologi informasi maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi akan memberikan kemudahan terhadap pemerintah desa dalam melakukan pelaporan maupun pertanggung jawaban publik sebagai bentuk asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa, pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya pemanfaatan teknologi dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat memperlancar pada proses implementasi siskeudes yang dilakukan oleh aparat desa, dengan kelancaran proses implementasi siskeudes tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan desa yang dihasilkan

SIMPULAN DAN SARAN

sesuai hasil penelitian serta pembahasan, maka kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan pada memoderasi korelasi implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. merupakan kompetensi

sumber daya manusia akan memperkuat dampak implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. (dua) Kualitas data tidak berpengaruh signifikan pada memoderasi korelasi implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. yang ialah kualitas data tidak akan memperkuat imbas implementasi siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan (3) Dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh signifikan pada memoderasi korelasi implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. yang adalah dukungan manajemen puncak tidak bisa memperkuat efek implementasi Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan. (4) Kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. artinya kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan (lima) Pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan pada memoderasi korelasi implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. merupakan pemanfaatan teknologi dapat memperkuat dampak implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hiyari, A., Al-Mashregy, M. H. hamood, Mat, N. K. N., & Alekam, J.
- M. (2013). Factors that Affect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality: A Survey in University Utara Malaysia. *American Journal of Economics*, 3(1), 27–31. <https://doi.org/10.5923/j.economics.20130301.06>
- Alfian, M. (2014). Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD (Penelitian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo). *3rd Economics & Business Research Festival*, (November), 1698–1712.
- Cooper, D. (2006). The Impact of Management ' s Commitment on Employee Behavior : A Field Study. *Professional Development and Conference*, 1(317), 7–14.
- Danuta, K. S. (2017). *Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement*. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2).
- Iivari, J. (2005). An empirical test of the DeLone-McLean model of information system success. *ACM SIGMIS Database*, 36(2), 8–27. <https://doi.org/10.1145/1066149.1066152>
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (n.d.). PENGARUH KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Publikasi*, 2008.
- Kamal, B., & Noermansyah, A. L. (2010). Analisis faktor yang mempengaruhi implemetasi simda dan kualitas laporan keuangan pada skpd. *Jurnal Publikasi Politeknik Harapan*.

- Kharis, A. (2010). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada PT. Avia Avian. *Tesis, Fakultas Ekonomi UPN*.
- Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Ejournal.Unsrat*, 98–109.
- Lestari, A. D., & Asyik, N. F. (2015). Pengaruh kualitas sistem informasi dan pengetahuan akuntansi terhadap kualitas informasi akuntansi. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9), 20.
- Pemerintah, P. (2010). Standar Akuntansi Pemerintah, 1
<https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76
- Sulandri, D. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR IMPLEMENTAS SISTEM INFORMASI PADA KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul). *Repository Universitas PGRI*. Xu, H. (2003). *Critical Success Factors for Accounting Information Systems Data Quality A dissertation submitted by*.